

IMPLEMENTASI ATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA MENGENAI PEMBATASAN SEPEDA MOTOR DALAM MENGURANGI KEMACETAN DI JL MH THAMRIN – JL MEDAN MERDEKA BARAT

Ayu Destiany

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan implementasi Aturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor berdasarkan *on going evaluation* dengan mengacu pada empat isu pokok agar implementasi kebijakan efektif, meliputi *communication*, *resource*, *disposition*, dan *bureaucratic structures*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *on going evaluation* pada tahap *communication*, penyampaian informasi terkait aturan tersebut yang dilakukan Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Direktorat Polda Metro Jaya sudah dilakukan secara maksimal, namun masih adanya pengendara sepeda motor yang melewati JL Mh Thamrin - JL Medan Merdeka Barat. Pada Tahap *resource* berkenaan dengan sumber daya manusia yang terkait dengan aturan tersebut dan didukung dengan fasilitas yaitu lahan parkir, bis gratis, dan rambu-rambu. Pada tahap *disposition* adanya perbedaan atau pengurangan kendaraan dengan melihat volume kendaraan, kecepatan dan waktu tempuh kendaraan sebelum dan sesudah aturan ditetapkan. Dari segi hasil monitoring pelanggaran pembatasan lalu lintas sepeda motor terlihat bahwa pelanggaran sebelum dan sesudah ditetapkan berkurang. Pada tahap *bureaucratic structures* masing-masing dinas sudah sesuai dengan tugas pokoknya, sehingga tidak menimbulkan *bureaucratic fragmentation*.

Kata Kunci : On Going Evaluation, Implementasi, Aturan Gubernur DKI Jakarta

IMPLEMENTASI ATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA MENGENAI PEMBATASAN SEPEDA MOTOR DALAM MENGURANGI KEMACETAN DI JL MH THAMRIN – JL MEDAN MERDEKA BARAT

Ayu Destiany

Abstract

This study was conducted to depict the implementation of DKI Jakarta Province Governor Regulation no 195 in the year 2014 regarding the limitation of motorcycle vehicle transportation on Moh. Thamrin based upon on going evaluation on 4 main issues for the regulation implementation become effective. They are communication, resource, disposition and bureaucratic structures. This study shows that on going evaluation in terms of communication, the information was provided by DKI Jakarta Government Public Relation, Traffic and Transportation Department, Police Department in Polda Metro Jaya had been done to a maximum. In terms of resource regarding human resources of that regulations and its facilities are parking areas around Mh. Thamrin – Medan Merdeka Barat, free buses and traffic boards. In terms of disposition, there were differences before and after the motorcycle vehicle limitation on Mh. Thamrin – Medan Merdeka Barat by looking at vehicle volume, speed and travelling time. By looking at the monitoring phase, there were less traffic violations before and after the regulations was conducted. In the bureaucratic structures, each department has done its job accordingly, thereby not causing any bureaucratic fragmentation.

Keyword: On Going Evaluation, Implementation, DKI Jakarta Province Governor Regulation